

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed., Vol. 11). Sinar Grafika.
- I Nyoman Putu Budiarta. (2016). *HUKUM OUTSOURCING* (Dino Sanggrha Irranda & Kamilia Sukmawati, Eds.; 1st ed.). Setara Press.
- Ilhami Bisri. (2013). *Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Lukman Hakim. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ali Hasan Zein, Amira Dzatina Nabila, & Avinda Yuda Wati, Eds.; 1st ed.). Deepublish
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Fatia Hijriyanti, Ed.; 1st ed.). Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Riadi Asra Rahmad. (2019). *Hukum Acara Pidana* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, Ed.; 19th ed.). MPR RI.

Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). UI Press.

Sugiono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*.
PT. Bumi Aksara.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Putri Kusuma Anggraini, Ed.; 1st ed.).
Deepublish.

Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973
jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189).

Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Tahun 1908 Nomor 190.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang

Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017.

Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

C. Sumber Lainnya

Jurnal

Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 370. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

Debrina Rahmawati. (2018). Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, 120.

- Elrica Debora Mosal, Anna Wahongan, & Harly Stanly Muaja. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Hukum, 11*(Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45759>.
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Perspektif, 21*(1), 60.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.
- Irianto, I., Kalo, S., Hamdan, M., & Ekaputra, M. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review, 1*(2), 71–78. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.53>.
- Jeane Neltje, & Indrawieny Panjiyoga. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum . *Journal Of Social Science Research, 3*(Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepidito, 1*(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Okta Vianus Puspa Negara, Jainah, Z. O., & Herlianto, S. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan. *Pranata Hukum, 15*(1), 93–103.
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.221>.

Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.273>.

Rendi Renaldi Mumbunan. (2019). Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana . *Journal Fakultas Hukum Unsrat* , 7(Vol. 7 No. 10 (2018): Lex Crimen).

Suwari Akhmaddhian, & Titan Triatna Kurniawan. (2019). Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(p-ISSN 2085-9970. e-ISSN 2715-4505).

Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>.

Wiwik Diah Muliasih. (2023). Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) . *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* , 2(Vol. 2 No. 1 (2023): Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional).

Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 01(Vol. 1 No. 1 (2022): Vol. 1 No. 1 (2022)).

Internet

- Agus Budianta. (2020, February 3). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html>.
- Ananda. (2022). *Teori kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Dian Dwi Jayanti. (2023, February 20). *2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/#_ftnref2.
- Dimas Aditya Saputra. (2022, March 31). *Ruang Lingkup Lelang Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papualmaluku/baca-artikel/14920/Ruang-Lingkup-Lelang-Dan-Permasalahan-Dalam-Penegakan-Hukum.html>.
- Eko Pandiangan. (2022, September 8). *Apakah Lelang Yang Telah Dilaksanakan Dapat Dibatalkan?* EAP LAWYER. <https://eap-lawyer.com/apakah-lelang-yang-telah-dilaksanakan-dapat-dibatalkan/>.
- Hadyan Iman Prasetya. (2022, December 14). *Ragam Dimensi Akuntabilitas Dan Arti Penting Memahaminya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/15714/Ragam-Dimensi-Akuntabilitas-Dan-Arti-Penting-Memahaminya.html>.

Mauluddin Mutz. (2023). Sistem Peradilan Pidana. In Maulana. AN & Arya-Bot (Eds.), *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peradilan_pidana.

Surya Hadi Purnama. (2021, December 17). *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>.

Willa Wahyuni. (2022, November 16). *Dasar Hukum Aset Dirampas Oleh Negara*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-aset-dirampas-oleh-negara-lt6374c26ac7a51/>.

Thesis

Adam Rayhan Fajar Pratama. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Lelang Yang Tidak Dihadiri Secara Fisik Oleh Peserta Lelang Di Tempat Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang* [Thesis (Diploma)]. Universitas Nasional.

Fikri Hukama Irhab. (2022). *Analisis Legalitas Lelang Melalui Internet Atau Media Sosial Yang Tidak Diselenggarakan Oleh KPKNL Maupun Balai Lelang*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Putusan-putusan

Putusan MK No. 114/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No: 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009.

Putusan No. 769/Pid.B/2012/PN.Cbi.

Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.